



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024 yang disusun untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Dokumen LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang pada tahun 2024, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun – tahun yang akan datang.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024.

Magelang, Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAGELANG

HANDINI RAHAYU, S.T., M. Eng
NIP. 19741118 200312 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang berupaya untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan ketercapaian Visi Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders sehingga diharapkan ke depan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan khususnya di bidang perencanaan daerah yang nanti dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang dapat dilihat dari ketercapaian dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada keberhasilan pencapaian indikator sasaran dari Misi Ketiga RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif”*. Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi ketiga yaitu (a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; (b) Menciptakan birokrasi yang kapabel, dan (c) Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Capaian kinerja satu indikator tujuan dan keempat indikator sasaran strategis yang diampu oleh Bapperida Kota Magelang menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja indikator tujuan yaitu kualitas perencanaan pembangunan daerah sebesar 101,72%, dan tiga indikator sasaran strategis yaitu indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 sebesar 104,27%, indikator Persentase ketercapaian target sasaran daerah sebesar 100%, indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 100%, dan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi sebesar 114,91%.

Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 4 Program, 19 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2024. Dari 6 indikator kinerja program, seluruh capaian kinerjanya sangat tinggi yaitu diatas 91%, dimana 5 indikator program capaiannya diatas 100%.

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.000.397.337,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.228.824.020,- atau sebesar 91.43%. Adapun capaian realisasi fisik 100% terhadap seluruh Sub Kegiatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

KATA PENGANTAR.....ii

IKHTISAR EKSKLUSIFiv

DAFTAR ISIv

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 1

 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 3

 1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan..... 4

 1.4 Isu – Isu Strategis..... 6

 1.5 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran..... 7

 1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 9

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 11

 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja..... 11

 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 13

 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 13

 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 18

 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 21

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 23

 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024..... 23

 3.2 Capaian Kinerja Lainnya..... 41

 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023..... 42

 3.4 Inovasi..... 43

 3.5 Lintas Sektor 45

BAB 4 PENUTUP..... 47

 4.1 Kesimpulan 47

 4.2 Langkah Perbaikan Kinerja 47

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Tahun 2024.....	7
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Bapperida Kota Magelang	8
Tabel 1.3	Anggaran Tahun 2024.....	9
Tabel 1.4	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Bapperida Kota Magelang 2021 - 2026 (Renstra)	12
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024.....	13
Tabel 2.3.1	Struktur Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Bapperida Kota Magelang Tahun Anggaran 2024	14
Tabel 2.3.2	Struktur Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Bapperida Kota Magelang Tahun Anggaran 2024.....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024.....	19
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	27
Tabel 3.4.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	28
Tabel 3.4.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah	29
Tabel 3.4.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	30
Tabel 3.4.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Untuk Kebijakan Daerah	30
Tabel 3.5.1	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah	33
Tabel 3.5.2	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah.....	34
Tabel 3.5.3	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Untuk Kebijakan Daerah	35
Tabel 3.5.4	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung terhadap Sasaran Strategis Bapperida Tahun 2024	37
Tabel 3.6	Kontribusi Sasaran Bapperida terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang	39
Tabel 3.7	Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang	39
Tabel 3.8	Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Daerah Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang	40
Tabel 3.9	Inventarisasi Lintas Sektor Perangkat Daerah	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang..... 2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota magelang 2

Gambar 1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi Bapperida Kota Magelang..... 3

Gambar 1.4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan Kinerja Bapperida Kota Magelang 6

Gambar 2.1 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Laporan di Smart Magelang.....21

Gambar 2.2 Screenshoot Website Bapperida Kota Magelang Kinerja Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Bapperida Kota Magelang 21

Gambar 2.3 Screenshoot Instagram Bapperida Kota Magelang 36

Gambar 3.1 Screenshoot Inovasi Belanja Masalah 41

Gambar 3.2 Screenshoot Inovasi E Rima 42

Gambar 3.3 Inovasi SEDAP POL..... 42

Gambar 3.4 Inovasi FOKUS POS DAYA..... 43

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja, dimana didalamnya terdapat proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif



TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR TUJUAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)

SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN SASARAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI UNTUK KEBIJAKAN DAERAH
INDIKATOR SASARAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase implementasi rencana kelitbitangan 2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2. Persentase pemanfaatan hasil inovasi

BIDANG	PERENCANAAN	EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERENCANAAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
--------	-------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

Sumber : Renstra Bapperida 2021 - 2026

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

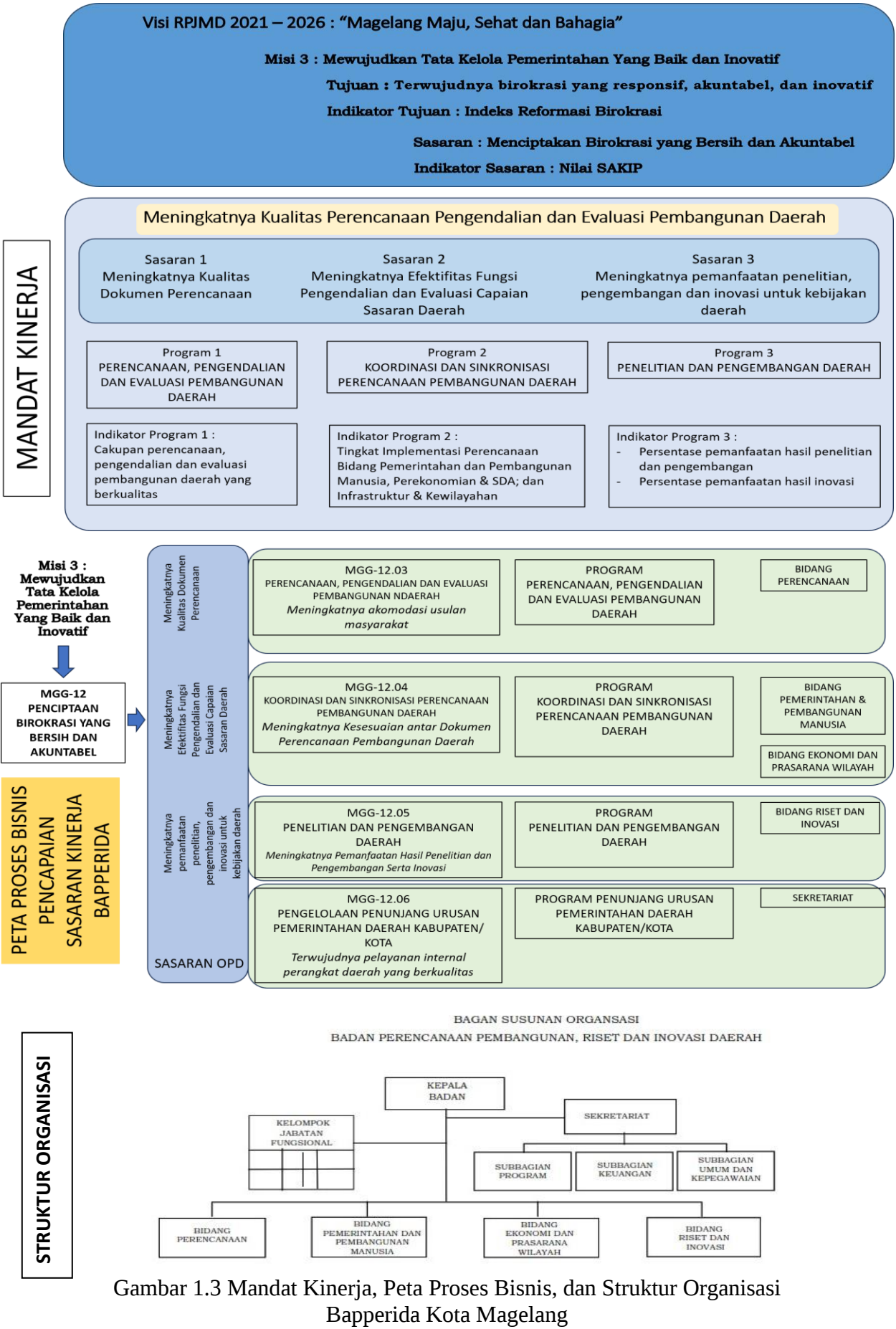
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Untuk mencapai sasaran kinerja utama, keselarasan antara Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi mutlak diperlukan. Adapun hubungan ketiga elemen tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi Bapperida Kota Magelang

1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Adapun Rincian Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- h. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

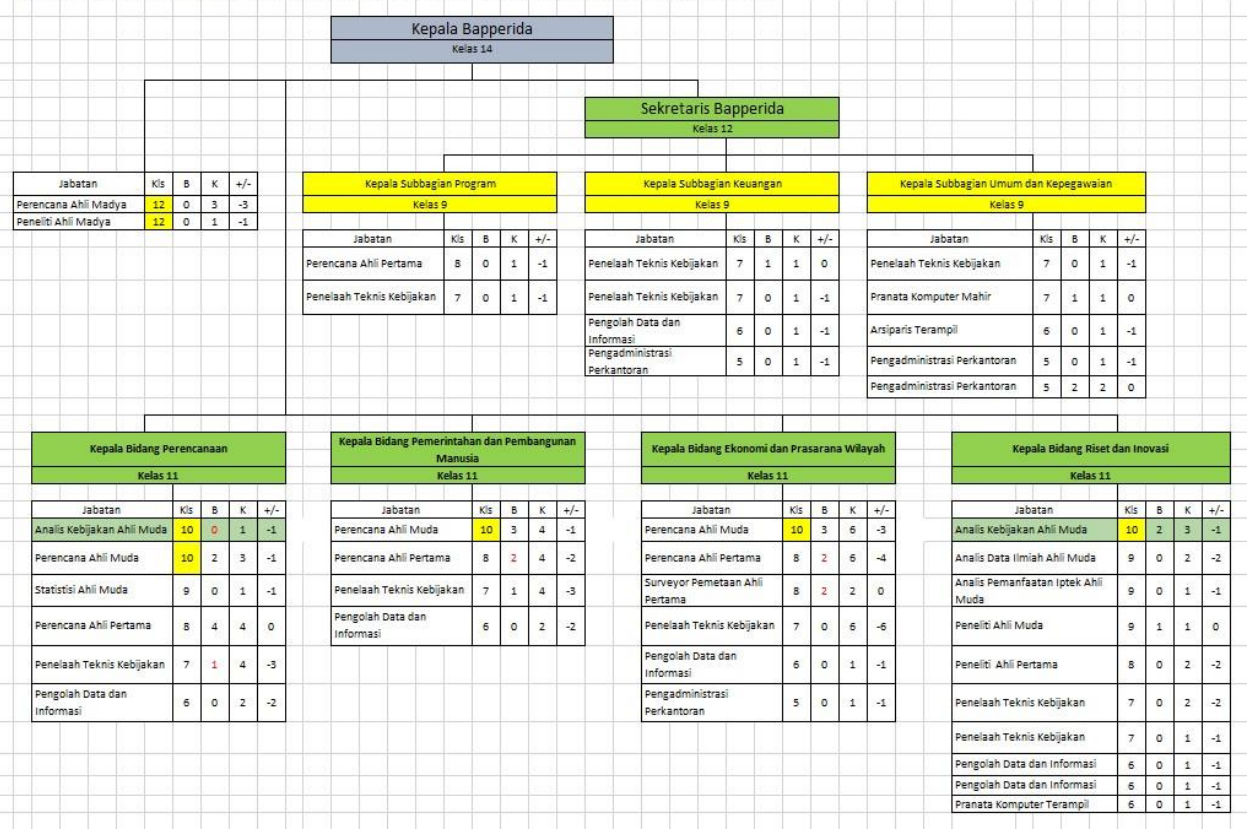
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Dalam pelaksanaan kinerja mewujudkan sasaran Bapperida Kota Magelang, tugas dan fungsi tersebut menjadi dasar dalam memetakan personil yang ada ke dalam peta jabatan Bapperida Kota Magelang sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; 2. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 3. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya. Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang dibagi habis kedalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang dibagi habis kedalam Jabatan Struktural dan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:		
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Bapperida		
2. Sekretaris		
1) Kepala Sub Bagian Program		
2) Kepala Sub Bagian Keuangan	1.Di bawah Sub Bagian Keuangan : Bendahara, Pengadministrasi Keuangan	
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.Di bawah Sub Bagian Keuangan : Pengadministrasi Umum	Pranata Komputer
3. Kepala Bidang Perencanaan	1.Di bawah Kabid Perencanaan : Analisis Perencanaan	Perencana
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.Di bawah Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia : Analisis Perencanaan	Perencana
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah		Perencana

		Surveyor Pemetaan	
6. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah		Analisis Kebijakan	Peneliti

U. SUSUNAN PETA JABATAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MAGELANG



Gambar 1.4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
Bapperida Kota Magelang

1.4 Isu – Isu Strategis

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani. Selain itu, Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu komponen pendukung dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Namun, fungsi kelitbangan belum sepenuhnya mendukung dalam proses perumusan kebijakan strategis kota. Oleh karena itu, optimalisasi dari peran penelitian dan pengembangan daerah perlu ditingkatkan, sehingga mendukung kualitas dokumen perencanaan daerah dan kebijakan daerah.

Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk perencanaan, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah (*bottom-up*), dari atas (*top-down*), teknokratik, politik dan inovasi.

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka isu strategis yang melingkupi Bapperida Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- 1. Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 2. Data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel.
- 3. Tingkat partisipasi masyarakat.
- 4. Kompetensi sumber daya perencanaan.
- 5. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah.
- 6. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 7. Peningkatan kualitas krenova/inovasi masyarakat agar siap diterapkan/dikomersialisasikan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2024 berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perem puan
			S2	S1/ D4	D3	SMA		S3	S2	S1/ D4	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6					7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi													
	Pimpinan Tinggi Pratama	1	√	√			1		1				0	1
B.	Jabatan Administasi													
	1. Administrator	5	√	√			5	1	4				3	2
	2. Pengawas	3		√			3		1	2			2	1
	3. Pelaksana	15		√	√	√	5		1	2		2	2	3
C.	Jabatan Fungsional													
	1. Perencana Ahli Madya	3	√	√			0						0	0
	2. Peneliti Ahli Madya	1	√	√			0						0	0
	3. Perencana Ahli Muda	13	√	√			8		7	1			4	4
	4. Analis Kebijakan Ahli Muda	4	√	√			2		2				0	2
	5. Peneliti Ahli Muda	1	√	√			1		1				1	0
	5. Statistisi Ahli Muda	1	√	√			0						0	0
	6. Analis Data Ilmiah Ahli Muda	2	√	√			0						0	0
	7. Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda	1	√	√			0						0	0
	8. Perencana Ahli Pertama	15	√	√			8			8			2	6
	9. Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	2	√	√			2		1	1			1	1
	10. Peneliti Ahli Pertama	2	√	√			0						0	0
	9. Pranata Komputer Mahir	1	√	√	√		1				1		1	0
	10. Pranata Komputer Trampil	1	√	√	√		0						0	0
	11. Penelaah Teknis Kebijakan	21	√	√	√		0						0	0
	Jumlah	88					36	1	18	14	1	2	16	20

Sumber : Data Kepegawaian Bapperida Kota Magelang 2024

❖ Menurut Jenis Kelamin:

Pegawai Bapperida Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi dimana pegawai dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin laki - laki. Perbandingannya 44,44% pegawai laki - laki dan 55,55% pegawai perempuan.

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi antara pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana adalah pejabat struktural (pejabat eselon II, III dan IV) sebesar 25%, pejabat fungsional sebesar 61,11% dan pelaksana sejumlah 13,88% dari total pegawai.

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana dan pasca sarjana (D4/S1/S2/S3) atau sebesar 91,66% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.4 berikut:

Ketersediaan sumber daya manusia yang ada sebesar 40,9 % dari Peta Jabatan Bapperida Kota Magelang, dimana masih diperlukan tambahan personil sebanyak 52 orang. Meskipun demikian, Bapperida senantiasa berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mencapai sasaran kinerja. Dalam pelaksanaan tugas fungsinya, Bapperida dibantu oleh tenaga Non ASN agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 1.2 Sarana Prasarana Bapperida Kota Magelang

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (Unit)	2024
A.	ASET TETAP		2,314,980,985.21
1	Peralatan dan Mesin		4.912.966.907,00
a	Alat Besar	3	202.951.000,00
b	Alat Angkutan	28	1.597.103.880,00
c	Alat Kantor dan Rumah Tangga	343	1.912.398.370,00
d	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6	70.062.080,00
e	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3	8.955.129,00
f	Komputer	125	1.116.546.448,00
2	Gedung dan Bangunan		2.397.414.900,00
a	Bangunan Gedung	1	2.397.414.900,00
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		5.842.860,00
a	Instalasi	1	5.842.860,00
4	Aset Tetap Lainnya		12.985.950,00
a	Bahan Perpustakaan	53	9.510.950,00
b	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	9	3.475.000,00
	Akumulasi Penyusutan		(5.014.229.631,79)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(4.330.595.808,42)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(680.907.155,37)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(2.726.668,00)
B.	ASET LAINNYA		205,803,928.00
1	Aset Tidak Berwujud		791.444.130,00
a	Aset Tidak Berwujud	15	791.444.130,00
2	Aset Lain-lain		1.579.006.585,00
b	Aset Lain-lain	144	1.579.006.585,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(715.155.162,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.449.491.625,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.449.491.625,00)
	TOTAL	731	2,520,784,913.21

Sumber : Data Inventaris Aset Bapperida Kota Magelang 2024

Kendaraan dinas yang dimiliki Bapperida Kota Magelang terdiri dari 6 (enam) unit mobil dinas, empat diantaranya sudah perlu peremajaan. Adapun Kendaraan dinas bermotor roda dua sudah mencukupi. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, ruang tunggu (lobi), ruang laktasi, dan toilet umum serta akses bagi kaum disabilitas berupa ram jalan untuk kursi roda dan tempat parkir. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan peralatan mesin lainnya (PC, laptop, printer, peralatan TI lainnya) sudah tersedia dalam kondisi baik.

Dukungan anggaran Bapperida Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024 sebesar Rp 9.000.397.337,00, bertambah Rp 156.693.433,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 8.843.703.907,00. Pada perubahan terdapat pengurangan belanja barang dan jasa sebesar Rp 32.251.434,00 terkait rasionalisasi anggaran. Di sisi lain, terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 250.000.000,00 sebagai apresiasi Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
			JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	8.843.703.907,00	8.819.418.237,00	(24.285.670,00)
5	1	01	Belanja Pegawai	6.414.870.314,00	6.422.836.078,00	7.965.764,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.833.593,00	2.396.582.159,00	(32.251.434,00)
5	2		BELANJA MODAL	0,00	180.979.100,00	180.979.100,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	170.979.100,00	170.979.100,00
			Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Jumlah Belanja	8.843.703.907,00	9.000.397.337,00	156.693.433,00
			Total Surplus/(Defisit)		156.693.433,00	156.693.433,00
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan	0	0	0
			Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran	0	0	0
			Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bapperida Kota Magelang 2024

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor : 700.1.2.1 / 012.C.EV/600 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang untuk ditindak lanjuti dan dipedomani untuk pelaksanaan di tahun 2023, yaitu :

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan upaya perbaikan untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan	mengadakan rapat internal Rapotan Bapperida setiap awal bulan untuk mengevaluasi capaian kinerja bulanan sebelumnya, dan mendiskusikan langkah strategis dalam mencapai target setiap bulannya. Dalam rapat internal tersebut dibahas evaluasi realisasi keuangan, capaian kinerja bulanan, Inovasi, Pengawasan dan Progres P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).
	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja melalui monitoring dan evaluasi target IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Bappeda sejalan dengan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Bappeda Kota Magelang yang dilakukan setiap Triwulan. Monitoring ini meliputi sejauh mana pencapaian target IKU yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sedangkan Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimonitoring dan di evaluasi pada perjanjian kerja eselon III yang merupakan faktor pendukung ketercapaian IKU Bapperida. Secara Umum, Monitoring dan Evaluasi Target IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilaksanakan setiap awal bulan dan setiap triwulan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang merupakan perjanjian kinerja. Adapun link yang dapat digunakan untuk memantau capaian kinerja Bapperida yaitu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JioM6z64Pynqjlx6_2KAf9rxuNCJFLxAcDhNp83MLHI/edit?gid=626509062#gid=626509062
	Tepat waktu dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja IKU, Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Evaluasi capaian kinerja IKU, Program /Kegiatan/Sub Kegiatan diagendakan setiap awal bulan dengan menyesuaikan agenda Bapperida Kota Magelang. Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan baik pada indikator Tujuan, sasaran, program, kegiatan hingga sub kegiatan pada aplikasi smart magelang. Selain Aplikasi Smart Magelang, Monitoring capaian kinerja juga dilakukan menggunakan google sheet sebagaimana pada link https://docs.google.com/spreadsheets/d/10sePnjgVkDLUxjpjsTqlmMF-6iVduymyXVEmyOS9Zc/edit?gid=2117430853#gid=2117430853

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah **“MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”**. Perumusan tujuan dan sasaran Bapperida mengacu pada misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bapperida Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”. Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bapperida dalam rangka pencapaian tujuan Bapperida selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
- 2) Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
- 3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida Kota Magelang beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Bapperida Kota Magelang 2021 – 2026 (Renstra)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 3									
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%
		1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
		2) Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%
		3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	NA	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Bapperida Kota Magelang memperhatikan tugas dan fungsi Bapperida Kota Magelang sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Bapperida Kota Magelang mendukung Visi Daerah yaitu “Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”, melalui Misi ketiga, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif”. Adapun Tujuan Daerah yang disupport yaitu “Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif” dengan sasaran daerah “Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel”.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bapperida Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	perencanaan yang yang didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel.
2.	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Penyediaan data yang akurat dan up to date
			Meningkatkan keterlibatan elemen pembangunan dengan memperbanyak unsur pentahelix yang terlibat
			Meningkatkan kualitas pendampingan perencanaan OPD
3.	Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi
4.	Sasaran 3: Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Mendorong peningkatan jejaring kelitbangan antar stakeholder ABCGM (Academia, Business, Community, Government and Mass Media)	Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung dokumen perencanaan
			Peningkatan kualitas hasil kelitbangan serta penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Adapun struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Struktur Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Bapperida Kota Magelang Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Penetapan	Perubahan	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp580.947.360,00	Rp445.757.964,00	(Rp135.189.396,00)
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp514.867.360,00	Rp383.200.164,00	(Rp131.667.196,00)
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp46.7070,00	Rp42.333.800,00	(Rp4.373.200,00)
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp7.3550,00	Rp5.9150,00	(Rp1.4400,00)
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp97.020.500,00	Rp42.018.300,00	(Rp552.200,00)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp363.784.860,00	Rp292.933.064,00	(Rp70.851.796,00)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp54.5740,00	Rp52.122.800,00	(Rp2.451.200,00)
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp54.5740,00	Rp52.122.800,00	(Rp2.451.200,00)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp5.1610,00	Rp5.1610,00	Rp0,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp5.1610,00	Rp5.1610,00	Rp0,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp6.3450,00	Rp5.2740,00	(Rp1.0710,00)
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp6.3450,00	Rp5.2740,00	(Rp1.0710,00)
Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp559.862.968,00	Rp435.094.086,00	(Rp124.768.882,00)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp315.186.248,00	Rp238.147.358,00	(Rp77.038.890,00)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp49.303.600,00	Rp32.943.600,00	(Rp16.3600,00)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp14.662.800,00	Rp10.809.200,00	(Rp3.853.600,00)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Penetapan	Perubahan	
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp56.966.060,00	Rp71.913.064,00	Rp14.9474,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp100.281.300,00	Rp32.688.300,00	(Rp67.5930,00)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp23.587.600,00	Rp11.609.200,00	(Rp11.978.400,00)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp70.384.888,00	Rp78.183.994,00	Rp7.799.106,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp148.914.060,00	Rp114.353.064,00	(Rp34.560.996,00)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp31.731.900,00	Rp10.8470,00	(Rp20.884.900,00)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp8.387.200,00	Rp8.387.200,00	Rp0,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp57.145.860,00	Rp51.041.764,00	(Rp6.104.096,00)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp22.220.100,00	Rp14.648.100,00	(Rp7.5720,00)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp5.841.200,00	Rp5.841.200,00	Rp0,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp23.587.800,00	Rp23.587.800,00	Rp0,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp95.762.660,00	Rp82.593.664,00	(Rp13.168.996,00)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp24.740.400,00	Rp14.180.400,00	(Rp10.5600,00)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Penetapan	Perubahan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp5.0650,00	Rp5.0650,00	Rp0,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp65.957.260,00	Rp63.348.264,00	(Rp2.608.996,00)
Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp416.517.420,00	Rp586.081.228,00	Rp169.563.808,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp132.864.700,00	Rp133.964.700,00	Rp1.1000,00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp58.283.400,00	Rp59.383.400,00	Rp1.1000,00
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp74.581.300,00	Rp74.581.300,00	Rp0,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp0,00	Rp10000,00	Rp10000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Rp0,00	Rp5000,00	Rp5000,00
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp0,00	Rp5000,00	Rp5000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp0,00	Rp6000,00	Rp6000,00
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp0,00	Rp6000,00	Rp6000,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp283.652.720,00	Rp292.116.528,00	Rp8.463.808,00
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp149.706.760,00	Rp104.918.464,00	(Rp44.788.296,00)
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Rp66.072.700,00	Rp119.520.200,00	Rp53.447.500,00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp60.873.260,00	Rp60.677.864,00	(Rp195.396,00)
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp700,00	Rp700,00	Rp0,00

Tabel 2.3.2
Struktur Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Bapperida Kota
Magelang Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Penetapan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.286.376.159,00	Rp7.533.464.059,00	Rp247.087.900,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp4.907.200,00	Rp4.355.600,00	(Rp551.600,00)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp1.022.000,00	Rp1.022.000,00	Rp0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp387.600,00	Rp289.200,00	(Rp98.400,00)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp387.600,00	Rp289.200,00	(Rp98.400,00)
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp703.600,00	Rp703.600,00	Rp0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp703.600,00	Rp348.800,00	(Rp354.800,00)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.702.800,00	Rp1.702.800,00	Rp0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.456.490.174,00	Rp6.462.118.942,00	Rp5.628.768,00
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.414.870.314,00	Rp6.422.836.078,00	Rp7.965.764,00
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp39.732.260,00	Rp37.395.264,00	(Rp2.336.996,00)
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp955.400,00	Rp955.400,00	Rp0,00
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp932.200,00	Rp932.200,00	Rp0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp3.446.400,00	Rp3.001.000,00	(Rp445.400,00)
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp3.446.400,00	Rp3.001.000,00	(Rp445.400,00)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp3.680.300,00	Rp24.053.800,00	Rp20.373.500,00
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp3.680.300,00	Rp3.446.900,00	(Rp233.400,00)
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp20.606.900,00	Rp20.606.900,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp173.585.700,00	Rp220.547.700,00	Rp46.962.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.972.100,00	Rp11.972.100,00	Rp0,00
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp27.562.000,00	Rp25.794.400,00	(Rp1.767.600,00)
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp8.482.000,00	Rp8.475.200,00	(Rp6.800,00)
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00
16	Penyediaan Bahan/Material	Rp11.136.500,00	Rp11.136.500,00	Rp0,00
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp2.600.000,00	Rp2.600.000,00	Rp0,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp104.305.000,00	Rp153.909.000,00	Rp49.604.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp3.328.100,00	Rp2.460.500,00	(Rp867.600,00)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp170.979.100,00	Rp170.979.100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Penetapan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp170.979.100,00	Rp170.979.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp312.750.365,00	Rp305.003.897,00	(Rp7.746.468,00)
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp411.300,00	Rp311.300,00	(Rp100.000,00)
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp110.512.885,00	Rp110.512.885,00	Rp0,00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp201.826.180,00	Rp194.179.712,00	(Rp7.646.468,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp331.516.020,00	Rp343.404.020,00	Rp11.888.000,00
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp165.206.000,00	Rp182.386.000,00	Rp17.180.000,00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp81.415.000,00	Rp83.981.000,00	Rp2.566.000,00
24	Pemeliharaan Mebel	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp36.542.600,00	Rp35.742.600,00	(Rp800.000,00)
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp45.352.420,00	Rp39.294.420,00	(Rp6.058.000,00)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024.

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja yang telah disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan dicapai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang
 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5				
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	89,23	78,46	80	87,69	89,32
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	89,29	75,86	75,86	89,29	89,29
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	82,05	74,36	76,92	79,49	82,05
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	%	55,32	40,43	40,43	40,43	55,32
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	65,17	17,65	17,65	41,65	65,17

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapperida, 2024

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh program – program dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.286.376.159	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 580.947.360	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 559.862.968	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 416.517.420	APBD

Pada Tahun 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya Perubahan Anggaran. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota
 Magelang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5				
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	89,23	78,46	80	87,69	89,23
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	%	89,29	75,86	75,86	89,29	89,29
3	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	82,05	74,36	76,92	79,49	82,05
4	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	%	55,32	40,43	40,43	40,43	55,32
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	65,28	17,65	17,65	65,28	65,28

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapperida, 2024

Adapun perubahan alokasi anggaran Program - Program dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.533.464.059	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 445.757.964	APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 435.094.086	APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 586.081.228	APBD

Terdapat penyesuaian target kinerja pada indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi, dimana target menjadi 65,28% dari tagret semula sebesar 65,17. Hal ini dikarenakan target semula berdasarkan target tahunan Renstra, sedangkan capaian akhir tahun sebelumnya lebih tinggi dari target tahunan Renstra, sehingga Target kinerja yang dipakai adalah target yang tertinggi.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- a. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Kota Magelang adalah aplikasi smart.magelangkota.go.id. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan keseluruhan rangkaian dari Perencanaan sampai dengan pengawasan, termasuk didalamnya progres bulanan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipantau secara real time.

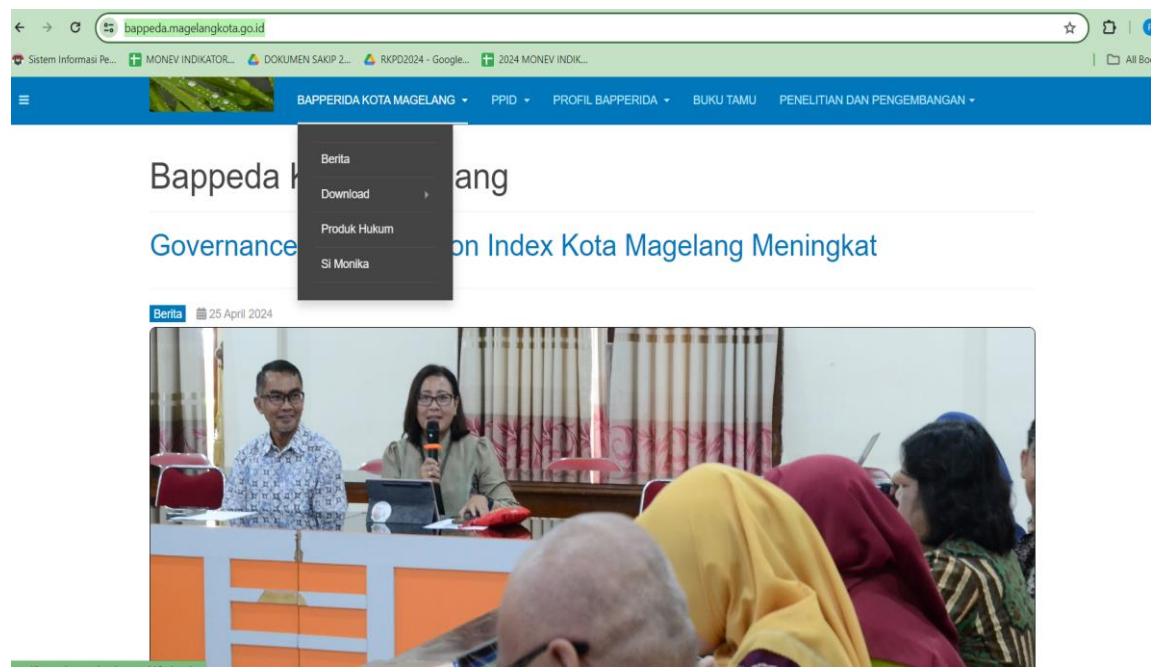
The screenshot shows the 'Rapor SKPD' (SKPD Report) interface on the smart.magelangkota.go.id website. The page displays a table of performance indicators for the 4th Quarter (Triwulan IV) of 2024. The table includes columns for No, Aspek (Aspect), Nilai Dasar (Basic Value), Klasifikasi (Classification), Bobot (Weight), Nilai Akhir (Final Value), Unit Lead, Catatan (Remarks), Rekomendasi (Recommendations), Tindak Lanjut (Follow-up), Bukti Dukung (Supporting Evidence), Catatan Verif (Verification Notes), and a status icon. The table lists six indicators related to the 'BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH' (Regional Development Planning Body).

No	Aspek	Nilai Dasar	Klasifikasi	Bobot	Nilai Akhir	Unit Lead	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Catatan Verif	Status
1	Capaian Kinerja	99.31	5	35	34.76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian kinerja sudah cukup baik	Pertahankan kinerja, perkuat kegiatan pendukung untuk capaian target 2025 mendatang	monitoring capaian kinerja akan dilanjutkan	terima kasih	terima kasih	Selesai
2	Sesuai Keuangan	91.43	5	30	18.29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Capaian realisasi keuangan sudah baik	Agar dilanjutkan di tahun anggaran yang akan datang	realisasi anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan			Selesai
3	Realisasi Fisik	100.00		15	15.00	SEKRETARIAT DAERAH	Capaian sudah baik	Pertahankan di tahun 2025	Realisasi fisik akan dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan			Selesai
4	Pengawasan	90.00		10	9.00	RSPERTORAT	cukup	cukup	tindak lanjut telah dilaksanakan			Selesai
5	P3DN	90.68	5	10	9.07	SEKRETARIAT DAERAH	Sudah Baik	Untuk Tahun 2025 semua pengadaan barang/jasa menggunakan sistem	teran akan dilanjutkan untuk pengadaan di tahun 2025			Selesai
6	Inovasi	100.00	5	10	10.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TL untuk inovasi 2025	Agar dipersiapkan bukti dukung inovasi 2025	Bukti dukung inovasi 2025 segera dipersiapkan		Terimakasih	Selesai

Total Nilai: 96.12

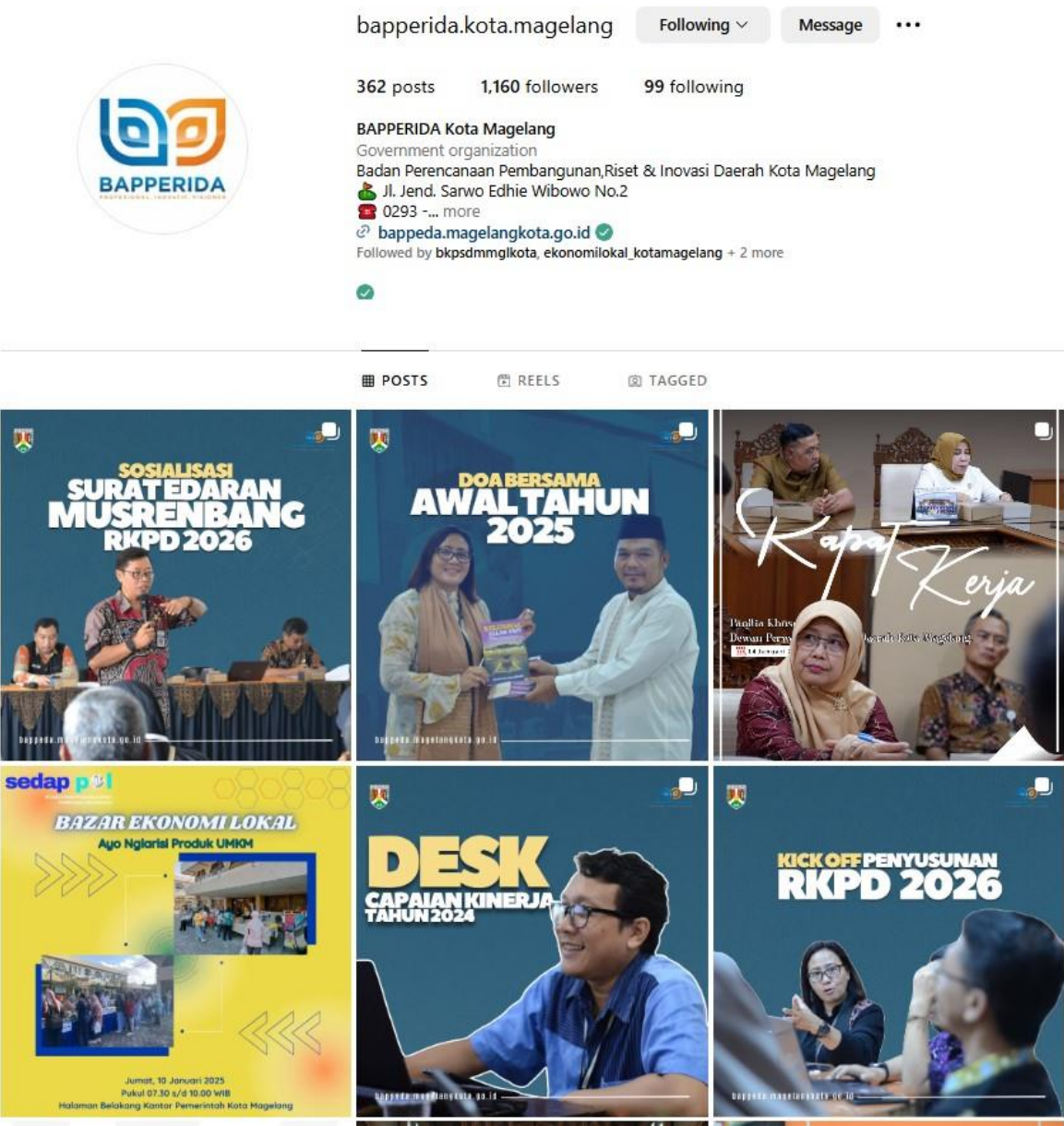
Gambar 2.1 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Raporan di Smart Magelang

- b. Website Bapperida dengan alamat <https://Bapperida.magelangkota.go.id/>. Website ini berisi tentang profil Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, termasuk didalamnya struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Berita, Informasi Publik, dan sebagainya.



Gambar 2.2 Screenshoot Website Bapperida Kota Magelang

- c. Instagram Bapperida dengan akun @bapperida.kota.magelang. Pemanfaatan media sosial ini bertujuan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Akun media sosial ini berisi kegiatan yang dilakukan Bapeerida Kota Magelang dan informasi umum lainnya.



Gambar 2.3 Screenshoot Instagram Bapperida Kota Magelang

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu organisasi yang tercermin di dalam keberhasilan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian visi misi organisasi atau visi misi Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akutabilitas Kinerja menjadi ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang di tetapkan pada awal tahun pelaksanaan program kegiatan

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organiasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran–sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator–indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran–sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

- 1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\%$$

- 2. Indikator bermakna negatif jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Analisis pencapaian indikator kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2020	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5						6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah <u>Meta Indikator :</u> $KP = \frac{((40\%xA) + (60\%xB))}{2}$ $A = \frac{\frac{\sum \text{komponen perencanaan minimal 24,5 th (n)}}{\text{target OPD dgn LHE}} \times 100\%}{\frac{\sum \text{AKIP komponen perenc. minimal 24,5 th (n)}}{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD}} \times 100\%}$ $B = \frac{\text{yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$	%	n.a	79,51	82,67	103,98	80,98	84,62	104,49	89,23	90,77	101,72
2	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 <u>Meta Indikator :</u> $\frac{\text{Jumlah PD dgn LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$	%	42,86	67,86	75	110,52	78,85	78,57	99,64	89,29	93,1	104,27
3	Sasaran 2: Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah <u>Meta Indikator :</u>	%	63,86	65,85	64,10	97,84	68,29	74,36	108,89	82,5	82,5	100,00

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line 2020	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5						6	7	8	9
		<i>Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya</i> <i>Jumlah seluruh indikator</i> x100% <i>tujuan sasaran RPJMD</i>											
4	Sasaran 3: Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan <u>Meta Indikator :</u> $\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}}$	%	n.a	17,02	17,02	100	36,17	34,04	94,11	55,32	55,32	100,00
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi <u>Meta Indikator :</u> realisasi indikator program 1 (kelitbangan) + realisasi indikator program 2 (inovasi) Program 1 : $\frac{\sum \text{hasil litbang dari th 2021} - \text{th (n)}}{\sum \text{litbang yg disusun hingga th (n - 1)}} \times 100\%$ Program 2: $\frac{(X1 + X2)}{(Y1 + Y2)} \times 100\%$ X1 = Jumlah inovasi PD-BUMD yang diterapkan X2 = Jumlah inovasi masyarakat yang dibangrap Y1 = Jumlah inovasi PD-BUMD yang terjaring Y2 = Jumlah inovasi masyarakat yang terjaring	%	26,10	24	22	91,67	49	65,28	133,22	65,28	75,01	114,91

Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, kinerja perencanaan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bapperida Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, semuanya mendapat nilai sangat baik.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
	Tujuan :Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	$KP = \frac{((40\%xA) + (60\%xB))}{2}$ <i>OPD dgn LHE AKIP</i> $A = \frac{\sum \text{komponen perencanaan minimal 24,5 th (n)}}{\text{target OPD dgn LHE}} \times 100\%$ $B = \frac{\sum \text{AKIP komponen perenc. minimal 24,5 th (n)}}{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}} \times 100\%$ <i>Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD</i>
1	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	$\frac{\text{Jumlah PD dgn LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$
2	Sasaran 2 : Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	$\frac{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$
3	Sasaran 3 : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase inplementasi rencana kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	realisasi indikator program 1 (kelitbangan) + realisasi indikator program 2 (inovasi) Program 1 : $\frac{\sum \text{hasil litbang dari th 2021 – th (n)}}{\sum \text{litbang yg disusun hingga th (n – 1)}} \times 100\%$ Program 2: $\frac{(X1 + X2)}{(Y1 + Y2)} \times 100\%$ X1 = Jumlah inovasi PD-BUMD yang diterapkan X2 = Jumlah inovasi masyarakat yang dibangrap Y1 = Jumlah inovasi PD-BUMD yang terjaring Y2 = Jumlah inovasi masyarakat yang terjaring

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. **Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Perencanaan merupakan proses awal dalam pembangunan daerah dan memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk mengatasi permasalahan dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Untuk mengukur kinerja dari tujuan ini terdapat 1 (satu) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu Kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator tujuan dari Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah persentase dari kualitas perencanaan pembangunan. Indikator ini dipengaruhi oleh perangkat daerah yang mendapatkan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 sesuai target yang ditentukan setiap tahunnya. Selain itu, persentase ketercapaian target daerah juga berpengaruh pada ketercapaian target indikator ini. Adapun maksud dari ketercapaian target sasaran daerah adalah jumlah indikator tujuan sasaran pada RPJMD yang capaian kinerjanya tinggi atau sangat tinggi.

Tabel 3.4.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian kinerja		
1.	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	84,62%	89,23%	90,77%	101,72%	85,37%	106,32%

Pada Tahun 2024, jumlah perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan ditargetkan sebanyak 26 perangkat daerah, dimana realisasinya sebanyak 27 perangkat daerah mendapatkan nilai komponen perencanaan diatas 24,5. Dengan demikian, capaiannya sebesar $27/26 * 100\% = 103,85\%$. Hal ini mengnunjukkan bahwa perangkat daerah di Kota Magelang sudah berupaya meningkatkan kualitas perencanaannya.

Terkait ketercapaian indikator sasaran daerah, pada tahun 2024, indikator tujuan sasaran RPJMD yang ditargetkan tercapai sebanyak 32 Indikator dari 39 indikator tujuan dan sasaran daerah. Adapun realisasi capaian indikator tujuan sasaran RPJMD 2021 – 2026 pada tahun 2024 yang berkinerja tinggi dan sangat tinggi sebanyak 32 indikator. Dengan demikian, pencapaian target nya sebesar $32/39 * 100\% = 82,05\%$.

Berdasarkan capaian LHE AKIP komponen perencanaan dan ketercapaian target sasaran daerah, makan nilai dari indikator Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu (40%

$*103.85) + (60\% * 82,05) = 90,77\%$. Bila dibandingkan dengan target 2024 yaitu sebesar 89,23%, maka capaiannya yaitu sebesar 101,72%.

Berdasarkan capaian tersebut, terlihat capaian kinerjanya sangat baik bahkan melampaui target akhir Renstra. Oleh karenanya, target tahun selanjutnya lebih tinggi dari Capaian Realisasi Tahun 2024.

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kota Magelang.
- b. Kerjasama antar pegawai yang baik dan saling bersinergi.
- c. Etos kerja pegawai Bapperida Kota Magelang yang baik.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor penghambat :

- a. Perubahan kebijakan di tingkat Nasional sehingga perlu penyesuaian strategi pencapaian target sasaran daerah.
- b. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan.

Kemanfaatan :

Perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah awal dan tahapan yang krusial dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Visi Misi Pembangunan Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah

Sesuai dengan ketentuan, dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan. Penilaian kualitas dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan hasil dari penilaian LHE AKIP komponen perencanaan. Tahun 2024 ditargetkan sekurang – kurangnya 26 perangkat daerah dari 29 perangkat daerah mencapai nilai minimal 24,5 untuk komponen perencanaan. Realisasinya ada 27 perangkat daerah yang nilainya diatas 24,5 untuk komponen tersebut. Adapun perangkat daerah yang masih dibawah 24,5 yaitu DPUPR dan Kecamatan Magelang Selatan. Dengan demikian, capaian dari indikator sasaran Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5 adalah $27/29 * 100\% = 93,10\%$. Dari atrget tahun 2024 sebesar 89,29, maka capaian kinerjanya sebesar 104,27%.

Meskipun demikian rata – rata capaian nilai komponen perencanaan perangkat daerah Kota Magelang sebesar 25,48, sehingga untuk tahun mendatang target akan ditingkatkan.

Tabel 3.4.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen
Perencanaan Daerah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian kinerja		
1.	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	78,57%	89,29%	93,1%	104,27%	100%	93,1%

- Faktor pendukung Keberhasilan :
- a. Koordinasi intensif dengan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tiap OPD.
 - b. Monitoring yang konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - c. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung kualitas dokumen perencanaan seperti aplikasi smart magelang.

- Faktor penghambat :
- a. Sinergitas antara teknokratis dan politis masih perlu ditingkatkan.
 - b. Tingginya intensitas kinerja dari bidang teknis sehingga perlu strategi dari perangkat daerah dalam mendukung penyusunana dokumen perencanaan.

Kemanfaatan :

Dokumen Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam akuntabilitas kinerja, dimana dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, Kualitas dokumen perencanaan harus diupayakan sebaik mungkin sehingga diharapkan dalam pelaksanaanya akan diperoleh hasil yang maksimal.

2. **Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah**

Pada RPJMD 2021 - 2026 terdapat 39 indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang harus dicapai. Berdasarkan permendagri nomor 86 Tahun 2017, indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai yaitu capaian indikator tujuan dan sasaran dengan kinerja minimal tinggi.

Tabel 3.4.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi
Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian kinerja		
1.	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	74,36%	82,05%	82,05%	100,00%	75,61%	109,11%

Pada tahun 2024, indikator tujuan sasaran RPJMD yang ditargetkan tercapai sebanyak 32 Indikator dari 39 indikator tujuan dan sasaran daerah. Adapun realisasi capaian indikator tujuan sasaran RPJMD 2021 – 2026 pada tahun 2024 yang berkinerja tinggi dan sangat tinggi sebanyak 32 indikator. Dengan demikian, pencapaian target nya sebesar $32/39 \times 100\% = 82,05\%$. Dengan demikian capaian kinerjanya sesuai dengan targetnya yaitu 100%.

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Koordinasi intensif dengan perangkat daerah dalam pencapaian target yang telah ditentukan, baik jangka menengah maupun tahunan.
- b. Monitoring yang konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung pengendalian dalam mencapai target sasaran daerah, seperti smart magelang dan google sheet.

Faktor penghambat :

- a. Adanya indikator target daerah yang nilainya tergantung dari pusat, sehingga capaiannya menunggu data dari kementerian atau kelembagaan pusat.
- b. Adanya indikator yang perlu diupdate tetapi terhambat kebijakan tidak dapat merubah renstra perangkat daerah.

Kemanfaatan :

Pengendalian dan Evaluasi bertujuan agar perencanaan yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan mestinya sehingga diharapkan hasil yang diperoleh sesuai dengan ayng diharapkan.

2. **Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Untuk Kebijakan Daerah**

Sasaran strategis selanjutnya adalah berkaitan dengan penelitian dan pengembangan daerah. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator, yaitu indikator persentase implementasi rencana kelitbangan dan dan indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Tabel 3.4.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Untuk Kebijakan Daerah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian kinerja		
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	34,04%	55,32%	55,32%	55,32%	100%	55,32%
2.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	65,28%	65,28%	65,28%	75,01%	68,44%	95,38%

Indikator sasaran yang pertama adalah persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ada di RKPD dibandingkan dengan jumlah kelitbangan dalam periode RPJMD. Pada Akhir Periode RPJMD 2021 – 2026, ditargetkan jumlah kelitbangan sebanyak 47 kelitbangan. Adapun pada tahun 2024, akumulasi jumlah kelitbangan yang di targetkan ada 26 kelitbangan. Adapun realisasi kelitbangan hingga tahun 2024 yang terealisasi adalah 26 kelitbangan. Sehingga capaian kinerjanya mencapai target yang direncanakan yaitu 100%. Adapun kelitbangan yang direalisasikan pada Tahun 2024 ada sembilan, yaitu:

- a. Strategi Pembangunan Inklusif berbasis regional excellent potential mapping melalui Business Cluster dalam Mendukung Pengembangan Pemasaran UMKM: Penta Helix Approach
- b. “Re-Concepting Strategi Pemasaran Taman Kyai Langgeng, Membangun Pola Marketing dan Konsep Taman Wisata Berkelanjutan”.
- c. Pengembangan Model Agrowisata Edukasi berbasis Urban Farming untuk Kesejahteraan Masyarakat dan mendukung branding Kota Magelang sebagai pusat edukasi dan inovasi ketahanan Pangan
- d. Tata kelola riset dan inovasi di Kota Magerang : Analisis Relevansi Kebijakan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah dengan Peraturan Perundang - undangan terkait.
- e. Database Kelitbangan dan Peraturan Tahun 2024.
- f. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah
- g. Kajian Pelaksanaan Monitoring Progamis
- h. Kajian Wisata Heritage Pecinan Kota Magelang
- i. Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif

Indikator sasaran selanjutnya adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi. Adapun definisi operasionalnya adalah akumulasi dari persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan persentase pemanfaatan hasil inovasi.

- Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan merupakan perbandingan antara jumlah hasil litbang yang diterapkan dari tahun pertama RPJMD 2021 – 2026 sampai dengan tahun berjalan dengan keseluruhan jumlah litbang yang disusun hingga tahun berjalan.

Pada Tahun 2024, target jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan yaitu 7 dari 17 hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada tahun sebelumnya. Adapun realisasinya pada tahun 2024 terdapat 4 hasil penelitian yang diterapkan. Keempat hasil penelitian yang diterapkan yaitu:

- a) Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Penanganan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya di Kota Magelang: Pendekatan Interpretative Structural Modeling

- b) Naskah Akademik tentang Penghargaan Pelestarian Cagar Budaya Kota Magelang
- c) Sistem Pengelolaan Data Riset dan Inovasi pada Kota Magelang
- d) Penyusunan Strategi Ketahanan Kota dalam Rangka Perubahan Iklim di Kota Magelang

Pada tahun 2023 terdapat tiga hasil penelitian yang diterapkan, sehingga akumulasinya hingga Tahun 2024 ada tujuh hasil penelitian yang diterapkan sehingga capaian indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yaitu $7/17 * 100\% = 41,18\%$

- Persentase pemanfaatan hasil inovasi merupakan banyaknya inovasi yang diterapkan, baik inovasi perangkat daerah/ BUMD dan Masyarakat, dibandingkan dengan seluruh inovasi yang terjaring.

Adapun target pada tahun 2024 sebesar 27,78%. Adapun realisasi dari tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah inovasi PD-BUMD yang terjaring = 80 inovasi
- b. Jumlah inovasi masyarakat yang terjaring = 53 inovasi
- c. Jumlah inovasi PD-BUMD yang diterapkan = 40 inovasi
- d. Jumlah inovasi masyarakat yang dibangrap = 5 inovasi

Realisasi persentase pemanfaatan hasil inovasi sebesar 33,83%. Tingginya capaian ini menunjukkan tingginya inovasi yang ada di Kota Magelang, Baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

Dari hasil tersebut, maka capaian dai indikator sasaran persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi adalah $41,18\% + 33,83\% = 75,01\%$.

Faktor pendukung Keberhasilan :

- a. Sosialisasi terkait inovasi kepada masyarakat dan perangkat daerah.
- b. Atensi yang tinggi dari perangkat daerah dalam berinovasi
- c. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga target dapat tercapai dengan baik.

Faktor penghambat :

- a. Hasil penelitian dan kajian yang telah disusun masih perlu diperdalam sehingga analisisnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemngambilan kebijakan.
- b. Banyaknya inovator yang kurang memenuhi bukti dukung sehingga perlu sosialisasi terkait daya dukung inovasi.

Kemanfaatan :

Penelitian dan inovasi merupakan instrumen yang penting dalam pembangunan. Hasil dari penelitian dan kajian yang tepat bermanfaat sebagai akselerator pembangunan. Demikian halnya dengan inovasi, baik inovasi dari perangkat daerah maupun dari masyarakat. Inovasi perangkat daerah berperan dalam meningkatkan pelayanan

publik, sementara inovasi masyarakat berperan dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu untuk pencapaian sasaran–sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan pemetaan dari nomenklatur program di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Indikator pelaksanaan program ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.1
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Real isasi	Capai an	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	Capaian	
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	81,74	77,81	95,19	445,757,964	433,121,592	97,17%	2.83
I	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	presentase elemen pembangunan yang terlibat	%	100	100	100	383,200,164	374,950,343	97,85%	2.15
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6	6	100	42,333,800	41,226,850	97,39%	2.61
2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4	4	100	5,915,000	5,891,500	99,60%	0.40
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100	42,018,300	41,408,500	98,55%	1.45
4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	100	292,933,064	286,423,493	97,78%	2.22
II	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	%	100	100	100	52,122,800	48,405,150	92,87%	7.13
5	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Orang	60	60	100	52,122,800	48,405,150	92,87%	7.13
III	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	%	100	100	100	5,161,000	4,840,000	93,78%	6.22
6	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	100	5,161,000	4,840,000	93,78%	6.22
IV	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cakupan kapasitas perangkat daerah dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	%	100	100	100	5,274,000	4,926,099	93,40%	9.95
7	Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	Laporan	1	1	100	5,274,000	4,926,099	93,40%	1.35

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Dokumen RPJPD Tahun 2025 - 2045, Dokumen RKPD Tahun 2025, dan Dokumen RKPD Perubahan 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Demikian pula dengan Pengendalian dan evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah antara pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya. data sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. oleh karenanya data yang akurat, terkini dan terpercaya sangat menentukan kualitas monitoring dan evaluasi serta kualitas perencanaan daerah.

Tabel 3.5.2
 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Efektifitas Fungsi
 Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Real sasi	Capai an	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	Capaian	
B	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90.58	90.58	100	238,147,358	234,756,495	98,58%	1.01
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	90.63	90.63	100	114,353,064	113,741,164	99,46%	1.01
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	70.83	70.83	100	82,593,664	82,377,014	99,74%	1.00
I	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	238,147,358	234,756,495	98,58%	1.42
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokume n	4	4	100	32,943,600	32,760,600	99,44%	0.56
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	100	10,809,200	10,760,000	99,54%	0.46
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100	71,913,064	71,590,243	99,55%	0.45
4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokume n	4	4	100	32,688,300	32,074,280	98,12%	1.88
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	100	11,609,200	11,130,000	95,87%	4.13
6	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100	78,183,994	76,441,372	97,77%	2.23
II	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	100	114,353,064	113,741,164	99,46%	0.54
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokume n	4	4	100	10,847,000	10,837,200	99,91%	0.09
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100	8,387,200	8,293,000	98,88%	1.12
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	Laporan	4	4	100	51,041,764	50,695,964	99,32%	0.68

	Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian								
4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	14,648,100	14,568,900	99,46%	0.54
5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2	2	100	5,841,200	5,773,000	98,83%	1.17
6	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4	4	100	23,587,800	23,573,100	99,94%	0.06
III	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	82,593,664	82,377,014	99,74%	0.26
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100	14,180,400	14,069,700	99,22%	0.78
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	100	5,065,000	4,995,000	98,62%	1.38
3	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100	63,348,264	63,312,314	99,94%	0.06

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan supporting untuk Program perencanaan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaannya selaras dengan Program Perencanaan tersebut. Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaannya juga tidak terdapat kendala dan tercapai 100%.

Tabel 3.5.3
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Untuk Kebijakan Daerah

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Real isasi	Capai an	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	Capaian	
C	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	41,17	41,17	100	586,081,228	581,219,438	99,17%	1.01
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	27,78	33,83	121,8	383,200,164	374,950,343	97,85%	2.15
I	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	61,11	61,11	100	133,964,700	131,889,650	98,45%	1.02
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	2	100	59,383,400	57,327,650	96,54%	1.04
2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	100	74,581,300	74,562,000	99,97%	1.00

II	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	45,45	45,45	100	100,000,000	99,900,000	99,90%	1.00
3	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	100	50,000,000	49,950,000	99,90%	1.00
4	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	100	50,000,000	49,950,000	99,90%	1.00
III	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	33	33	100	60,000,000	59,951,100	99,92%	1.00
5	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dokumen	1	1	100	60,000,000	59,951,100	99,92%	1.00
IV	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan	%	65,28	65,28	100	292,116,528	289,478,688	99,10%	1.01
6	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	2	100	104,918,464	104,390,344	99,50%	1.01
7	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3	3	100	119,520,200	118,751,380	99,36%	1.01
8	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	2	100	60,677,864	59,336,964	97,79%	1.02
9	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	100	7,000,000	7,000,000	100%	1.00

Pelaksanaan kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2024. Adapun terkait Inovasi, baik dari Perangkat Daerah maupun masyarakat sudah menunjukan arah peningkatan. Pada Perubahan anggaran tahun 2024 terdapat penambahan tiga kajian yaitu Kajian bidang Aspek Aspek Sosial, Kajian Pariwisata, dan Kajian Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan.

Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan.

Perlu dilakukan riset-riset dalam berbagai aspek yang memberikan dukungan data dan kajiannya sebagai basis perencanaan pembangunan serta menyelenggarakan dan memfasilitasi event-event lomba inovasi untuk OPD maupun masyarakat.

Tabel 3.5.4
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung terhadap Sasaran Strategis Bapperida
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Real isasi	Capai an	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	Capaian	
A	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	%	100	100	100	7,533,464,059	6,783,608,317	90,05%	9.95
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	4,355,600	4,296,800	98,65%	1.35
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokume n	2	2	100	1,022,000	984,400	96,32%	3.68
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokume n	1	1	100	289,200	288,500	99,76%	0.24
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokume n	1	1	100	289,200	288,700	99,83%	0.17
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokume n	1	1	100	703,600	702,000	99,77%	0.23
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokume n	1	1	100	348,800	348,800	100,00%	0.00
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	6	6	100	1,702,800	1,684,400	98,92%	1.08
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	%	100	100	100	6,462,118,942	5,754,309,250	89,05%	10.95
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	36	36	100	6,422,836,078	5,715,034,786	88,98%	11.02
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokume n	12	12	100	37,395,264	37,392,464	99,99%	0.01
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	955,400	951,000	99,54%	0.46
10	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokume n	1	1	100	932,200	931,000	99,87%	0.13
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	3,001,000	2,989,000	99,60%	0.40
11	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	laporan	1	1	100	3,001,000	2,989,000	99,60%	0.40
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	24,053,800	22,191,050	92,26%	7.74
12	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	1	1	100	3,446,900	3,427,000	99,42%	0.58
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	1	100	20,606,900	18,764,050	91,06%	8.94
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	220,547,700	220,292,887	99,88%	0.12
14	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	28	28	100	11,972,100	11,972,000	99,99%	0.00

15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	49	49	100	25,794,400	25,619,750	99,32%	0.68
16	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	15	100	8,475,200	8,468,700	99,92%	0.08
17	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100	4,200,000	4,180,000	99,52%	0.48
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	30	30	100	11,136,500	11,134,500	99,98%	0.02
19	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	2,600,000	2,600,000	100,00%	0.00
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	78	78	100	153,909,000	153,886,937	99,98%	0.01
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	12	12	100	2,460,500	2,431,000	98,80%	1.20
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	100	100	170,979,100	157,420,000	92,07%	7.93
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan	1	1	100	170,979,100	157,420,000	92,07%	7.93
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	305,003,897	294,578,575	96,58%	3.42
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100	311,300	211,000	67,78%	32.22
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	110,512,885	100,737,863	91,15%	8.85
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8	100	194,179,712	193,629,712	99,72%	0.28
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	343,404,020	327,530,755	95,38%	4.62
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100	182,386,000	169,862,365	93,13%	6.87
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100	83,981,000	81,702,780	97,29%	2.71
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	100	2,000,000	1,985,000	99,25%	0.75
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	100	35,742,600	34,888,610	97,61%	2.39
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	39,294,420	39,092,000	99,48%	0.52

Program Penunjang merupakan program yang mendukung tercapainya sasaran strategis Bapperida Kota Magelang. Meskipun tidak mendukung secara langsung, namun berperan penting dalam kelancaran operasional Organisasi. Adapun capaian kinerja program sebesar 90,05%. Sisa anggaran yang tidak terserap berasal dari sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang realisasi diatur sesuai ketentuan.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Berdasarkan Renstra Bapprida, Sasaran Strategis bapperida Kota Magelang adalah mendukung Visi Daerah yaitu “Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”, melalui Misi ketiga, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif”. Adapun Tujuan Daerah yang disupport yaitu “Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif” dengan sasaran daerah “Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel”.

Tabel 3.6
Kontribusi Sasaran Bapperida terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Pemerintah Daerah				Perangkat Daerah			
	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi
1	Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	80.01	75.02	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	89,29	93,1

Terkait dukungan terhadap program unggulan Pemerintah Kota Magelang, Program yang ada di Bapperida pada dasarnya mendukung seluruh program unggulan dalam aspek perencanaan. Secara spesifik, program – program yang mendukung sasaran strategis Bapperida mendukung program unggulan Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Tabel 3.7
Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Program Unggulan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah				
		Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	81,74	77,81	95,19
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang	90.58	90.58	100

		Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
			Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	90.63	90.63	100
			Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70.83	70.83	100
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	41,17	41,18	100
			Persentase pemanfaatan hasil inovasi	27,78	33,83	121,8

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Anggaran dan Realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan pada program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.8
Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap
Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Tar get	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	89,29	93,1	104,27	45,757,964	433,121,592	97.17%	9.95
2	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	82,05	82,05	100,00	35,094,086	430,874,673	99.03%	1.35
3	Meningkatnya pemanfaatan	Persentase implementas		55,32	55,32	100,00	86,081,228	581,219,438	99.17%	3.68

2. E – RIMA (Elektronik Riset dan Inovasi Kota Magelang)

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengelola data kelitbangan dengan baik, termasuk pendayagunaan dan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, untuk memudahkan akses oleh pengguna baik untuk perencanaan pembnagunan maupun pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak, dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan, publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan, serta mengelola Hak Kekayaan Intelektual masyarakat dan ASN Kota Magelang dengan baik.



Gambar 3.2 Screenshoot Inovasi E Rima

3. SEDAP POL (Sinergitas Dalam Pengembangan dan Pembangunan Ekonomi Lokal)

SEDAP POL merupakan pelaksanaan sinergitas antara pemerintah , pelaku usaha dan stakeholder terkait dengan pengembangan ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rekomendasi kebijakannya yaitu Penguatan Kelembagaan FEDEP, Pengembangan Kapasitas UMKM, Akselerasi Pemasaran Digital, Penguatan Akses Pasar, dan Inovasi dan Pengembangan Produk.



Gambar 3.3 Inovasi SEDAP POL

4. FOKUS POS DAYA (Forum Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air)

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya air bagi seluruh makhluk hidup dan kegiatan manusia.

Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan infrastruktur air, edukasi masyarakat, pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan teknologi terbaru, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Air adalah sumber kehidupan, dan sudah saatnya untuk menjaga dan mengelolanya dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik.

Permasalahan air bersih di Kota Magelang adalah tantangan serius yang perlu segera ditangani dengan cara pengelolaan sumber daya air yang tepat dan bijak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan investasi yang tepat dalam infrastruktur, perubahan perilaku masyarakat, dan penggunaan teknologi modern, dan konservasi sumber mata air dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pemerintah, swasta dan Masyarakat harus bersama-sama berkontribusi dalam menjaga sumber air bersih agar tetap aman untuk generasi mendatang.



Gambar 3.4 Inovasi FOKUS POS DAYA

3.5 Lintas Sektor

Bapperida Kota Magelang dalam upaya mencapai sasaran strategisnya tentu tak lepas dari kolaborasi dengan stake holder. Adapun kegiatan lintas sektor Bapperida adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Inventarisasi Lintas Sektor Perangkat Daerah

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitasi, Koordinasi, dan Sinkronisasi	RKPD, RKPD Perubahan, Rantekno	Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian kinerja Tujuan

			pelaksanaan Rakortek	RPJMD, RPJPD 2025 - 2045	Kota Magelang	RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan Mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		DPRD	Pokok Pikiran DPRD			
		Biro Hukum	Penetapan Perwal/ SK Walikota			
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
		Perguruan tinggi	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		LSM	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		Masyarakat	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah	Koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian sasaran daerah	RKPD, RKPD Perubahan, Rantekno RPJMD, RPJPD 2025 - 2045	Perangkat Daerah Kota Magelang	Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan
2.	Penyelenggaraan Satu Data	Wali data pendukung (Perangkat Daerah, BPS, BUMD,	Menyampaikan data dan metadata kepada walidata, membantu walidata provinsi membina produsen data	Data statistik, data geospasial	Perangkat Daerah Kota Magelang	Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan publik
3.	Inovasi Daerah	Perangkat Daerah	Inovasi yang mendukung Pembangunan di Kota Magelang	Krenova	Masyarakat Kota Magelang	Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan publik
		Masyarakat				
		Perguruan Tinggi				

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang pada tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari satu tujuan dan tiga sasaran strategis dengan lima indikator kinerja. Capaian kinerja kelima indikator tujuan dan sasaran strategis menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian kinerja lima indikator kinerja tersebut $\leq 100\%$.
- b. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bapperida telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya didukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Dukungan pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui 4 Program, 19 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2024.
- c. Dari evaluasi terhadap 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bapperida pada tahun 2024, semua telah dilaksanakan.
- d. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang pada tahun 2024 sebesar **Rp. 9,000,397,337,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8,228,824,020,00** atau sebesar **91,43%**.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2024, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

1. Pengkoordinasian dan evaluasi Pencapaian Visi Misi yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran berikut indikatornya, dimana tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.
2. Dilihat dari pencapaian indikator yang diampu oleh Bapperida, pencapaiannya secara umum sudah sangat baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di antaranya:
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh

- program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.
3. Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan, baik terkait periode waktu maupun lingkup perencanaannya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah ini terlihat dari indikator “Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD”. Untuk memastikan sinkronisasi ini senantiasa terjaga, maka perlu upaya sebagai berikut:
- Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD (dokumen perencanaan tahunan) berpedoman pada RPJMD (dokumen perencanaan jangka menengah);
 - Mengoptimalkan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan di Kota Magelang senantiasa *on the track*.
4. Pengakomodiran usulan Musrenbang memerlukan strategi-strategi yang efektif dan efisien untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Upaya yang bisa dilaksanakan antara lain:
- Melakukan pembaharuan sarasehan dan musrenbang Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
 - Mengoptimalkan pembekalan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan sarasehan serta Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
 - Mengoptimalkan teknologi informasi untuk membantu dalam menjaring aspirasi setiap elemen masyarakat.
5. Mengintensifkan pelaksanaan riset-riset di berbagai bidang yang dapat dipergunakan sebagai basis dalam menyusun perencanaan yang berkualitas
6. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Magelang untuk meningkatkan akomodasi pokok pikiran dewan. Pemberian pemahaman terkait pokok pikiran yang sesuai dengan kriteria serta pemaparan terkait agenda perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pokok pikiran dewan sehingga dapat meningkatkan tingkat akomodasi tersebut.
7. Mengembangkan budaya inovasi dalam sendi-sendi kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang mendukung terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan.
8. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bapperida
- Pengoptimalan fungsi kelembagaan sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida, baik dalam hal pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, juga dalam hal kualitas sumber daya aparatur serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan. Sampai dengan tahun 2023, seluruh komponen fungsi

kelembagaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya kedepan perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalan fungsi kelembagaan tersebut, diantaranya melalui:

- Memetakan kebutuhan dan menghimpun usulan dari seluruh elemen Bapperida dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.
- Memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- Melakukan koordinasi intensif secara berkala terkait perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 dan 2025
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LHE SAKIP 2023
PENETAPAN IKU
PERUBAHAN IKU
RENCANA AKSI 2024
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
PENGHARGAAN

